

## ANALISIS PENGARUH INVESTASI DAN UPAH MINIMUM KABUPATEN TERHADAP KESEMPATAN KERJA DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI BALI

Ni Kadek Vina Ardiana Dewi<sup>1</sup>  
I Komang Gde Bendesa<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia  
e-mail: vinaardiana400@gmail.com

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh investasi dan upah minimum terhadap kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Bali. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data panel pada tahun 2010-2017 di setiap kabupaten/kota Provinsi Bali. Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode *observasi non partisipan* yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. Teknik analisis yang digunakan adalah *path analysis*. Hasil penelitian diperoleh bahwa Investasi secara langsung tidak berpengaruh terhadap kesempatan kerja, sedangkan upah minimum kabupaten secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja di kabupaten/kota Provinsi Bali. Investasi secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, upah minimum kabupaten secara langsung tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, dan kesempatan kerja secara langsung tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Bali. Investasi dan upah minimum kabupaten tidak memiliki pengaruh tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui kesempatan kerja di kabupaten/kota Provinsi Bali.

**Kata kunci:** investasi, upah minimum kabupaten, kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi

### ABSTRACT

*The purpose of this study was to analyze the effect of investment and minimum wages on employment opportunities and economic growth in the districts/cities of the Province of Bali. The data used in this study are panel data in 2010-2017 in each districts/city of the Province of Bali. The method of data collection is done by the method of non-participant observation obtained from the Central Bureau of Statistics of Bali Province. The analysis technique used is path analysis. The results of the study showed that direct investment had no effect on employment opportunities, while the district minimum wages directly had a positive and significant effect on employment opportunities in the district/cities of the Province of Bali. Direct investment has a positive and significant effect on economic growth, district minimum wages directly have no effect on economic growth, and direct employment opportunities have no effect on economic growth in the districts/cities of the Province of Bali. Investment and district minimum wages do not have an indirect influence on economic growth through employment opportunities in the districts/cities of the Province of Bali.*

**Keywords:** investment, district minimum wages, employment opportunities, economic growth

## **PENDAHULUAN**

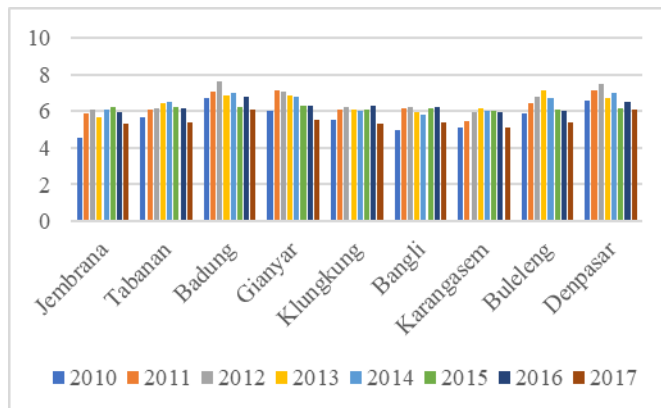
Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini sudah mulai menuju ke arah yang lebih baik (Lindblad dan Kian Wie, 2007). Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran yang nyata dari dampak suatu kebijakan pembangunan yang dilaksanakan, khususnya dalam bidang ekonomi (Taufik dkk, 2014). Pertumbuhan tersebut merupakan laju pertumbuhan yang terbentuk dari berbagai macam sektor ekonomi yang tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Pertumbuhan ekonomi semestinya mampu mendorong pembangunan daerah (Taiwo and Abayomi, 2011). Pertumbuhan ekonomi akan mampu mengurangi tingkat kemiskinan (Seran, 2017). Bagi daerah indikator ini sangat perlu untuk mengetahui keberhasilan pembangunan yang telah dicapai dan berguna untuk menentukan arah pembangunan di masa yang akan datang. Laju pertumbuhan ekonomi daerah digambarkan oleh perkembangan Produk Domestik Regional Bruto. Pertumbuhan sangat dibatasi oleh akses terbatas ke sumber daya seperti keuangan internal atau sekelompok pekerja keluarga, karena perusahaan mikro dan kecil menghasilkan pekerjaan dan meningkatkan output nasional (Parinduri, 2016).

Menurut Simon Kuznets mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologi yang diperlukan (Jhingan, 2007). Definisi ini mempunyai tiga komponen: (1) pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus-

menerus persediaan barang; (2) teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyesuaian aneka macam barang kepada penduduk; (3) penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan umat manusia dapat dimanfaatkan secara tepat.

Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan produksi artinya makin banyak barang atau jasa yang diproduksi akan diikuti oleh pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi (Dayuh Rimbawan, 2012). PDB memiliki peran penting dalam suatu perekonomian karena dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dalam suatu Negara (Suryahadi *et al*, 2012). Dari satu periode ke periode lain kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini, disebabkan karena faktor-faktor produksi akan selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya (Sukirno 2002).

Pertumbuhan ekonomi penting bagi masyarakat karena meningkatkan pendapatan dan konsumsi riil, baik secara absolut dan per kapita, dan karenanya membuat kita secara materi lebih baik (Mawar *et al*, 2015). Pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali saat ini ditunjang oleh berbagai sektor yang terus berkembang dan telah menunjukkan angka perbaikan. Sektor yang memiliki agregasi aktivitas ekonomi terbesar adalah sektor pariwisata, sektor pertanian, industri dan jasa (Suryahadi *et al*, 2012). Berikut disajikan gambar pertumbuhan ekonomi menurut kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2010-2017.



**Gambar 1.**

**Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2010-2017 (dalam %)**

*Sumber:* Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2018

Gambar 1 menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Bali tahun 2010-2017 mengalami peningkatan dan penurunan. Dalam delapan tahun terakhir yakni diawali pada tahun 2010 laju pertumbuhan ekonomi tertinggi berada di Kabupaten Badung yaitu sebesar 6,68 persen dan terendah ada pada Kabupaten Jembrana yaitu sebesar 4,57 persen. Pada tahun 2011 laju pertumbuhan tertinggi berada di Kota Denpasar sebesar 7,16 persen dan terendah berada pada Kabupaten Karangasem yaitu sebesar 5,43 persen. Pada tahun 2012 laju pertumbuhan ekonomi tertinggi berada di Kabupaten Badung 7,64 persen dan terendah ada pada Kabupaten Karangasem sebesar 5,93 persen. Pada tahun 2013 laju pertumbuhan ekonomi tertinggi berada di Kabupaten Buleleng 7,15 persen dan terendah ada pada Kabupaten Jembrana 5,69 persen. Pada tahun 2014 laju pertumbuhan tertinggi berada pada Kota Denpasar 7,00 persen dan terendah ada pada Kabupaten Bangli yaitu sebesar 5,83 persen. Tahun 2015 laju pertumbuhan tertinggi ada pada Kabupaten Gianyar 6,30 persen dan terendah ada pada Kabupaten Karangasem yaitu sebesar 6,00 persen. Pada tahun

2016 laju pertumbuhan tertinggi berada pada Kabupaten Badung sebesar 6,81 dan jumlah terendah ada pada Kabupaten Karangasem 5,92 persen. Pada tahun 2017 laju pertumbuhan tertinggi berada pada Kabupaten Badung yaitu sebesar 6,11 persen dan terendah berada pada Kabupaten Karangasem yaitu sebesar 5,08 persen.

Salah satu faktor untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah meningkatkan jumlah kesempatan kerja. Teori pertumbuhan ekonomi neo klasik dimana yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kuantitas dan kualitas tenaga kerja yang dinyatakan dalam kesempatan kerja (Sukirno, 2006), artinya kesempatan kerja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Seberapa besar tingkat kesempatan kerja di suatu daerah dapat diukur dengan banyaknya jumlah orang yang diterima bekerja dan tersedianya lapangan pekerjaan (Arsyad, 2010). Kenyataannya kemampuan suatu daerah dalam menciptakan lapangan kerja baru sangatlah terbatas sehingga untuk mendapatkannya relatif semakin sulit. Orang yang berusia 15-64 tahun yang memiliki pekerjaan, yang mulai melamar pekerjaan, orang yang bersekolah dan melakukan pekerjaan dirumah tanpa menerima upah dikatakan tenaga kerja (Cahya dan Indrajaya, 2015). Pertumbuhan angkatan kerja yang tinggi tidak menjadi masalah apabila dapat terserap oleh lapangan kerja yang ada, sebaliknya akan menjadi masalah jika tidak bisa terserap oleh lapangan kerja (Indradewa dan Suardhika, 2015). Persaingan yang ketat dalam mendapatkan pekerjaan mengakibatkan daya tawar mereka menjadi rendah sehingga harga merkapun (upah) juga menjadi rendah. Investasi merupakan salah satu faktor

untuk meningkatkan kesempatan kerja. Investasi merupakan hal yang penting bagi perekonomian suatu negara. Investasi memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara (Sarungu dan Maharsi, 2013).

Investasi dapat menjadi titik tolak bagi keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan di masa depan karena dapat menyerap tenaga kerja, sehingga dapat membuka kesempatan kerja baru bagi masyarakat yang pada gilirannya akan berdampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat (Wahyuni dkk, 2014). Investasi merupakan salah satu pilar pertumbuhan ekonomi (Sjafii, 2009). Menurut Kunle (2014). Investasi merupakan pengeluaran penanaman modal untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi (Hayati, 2016).

Penanaman modal dapat bersumber dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA). Salah satu tujuan dari adanya investasi dari pihak swasta yaitu untuk menutupi kekurangan dari tabungan domestik untuk pembangunan ekonomi (Yassin *et al*, 2018). Adanya investasi akan mendorong terciptanya barang modal baru sehingga akan menyerap faktor produksi baru yaitu menciptakan lapangan kerja baru (Prasojo, 2009). Meningkatnya kesempatan kerja diharapkan mampu mendorong jumlah produksi barang dan jasa sehingga akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Beberapa kebijakan yang telah ditempuh oleh pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran, salah satunya dengan mendorong pertumbuhan ekonomi agar dapat menciptakan kesempatan kerja (Siregar dan Wahyuniarti, 2008). Kebijakan lainnya yang sering ditempuh oleh pemerintah untuk meningkatkan kesempatan kerja, selain mendorong pertumbuhan ekonomi, yaitu

dengan kebijakan penetapan upah minimum (Tapparan, 2017). Juwita (2014) menyatakan pemerintah dapat meningkatkan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi dengan kebijakan penetapan upah minimum.

Upah Minimum sebagaimana yang dikemukakan didalam teori upah efisiensi bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dari tenaga kerja, sehingga berdampak pada meningkatnya hasil produksi dari suatu perusahaan, kemudian akan diikuti dengan meningkatnya permintaan akan tenaga kerja. Teori upah efisiensi ini juga didukung oleh hasil penelitian (Capeding et al., 2013) yang dilakukan oleh yang mengatakan bahwa upah minimum dapat meningkatkan kesempatan kerja. Upah minimum sebagaimana yang dikemukakan didalam teori upah efisiensi bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dari tenaga kerja, sehingga berdampak pada meningkatnya hasil produksi dari suatu perusahaan, kemudian akan diikuti dengan meningkatnya permintaan akan tenaga kerja.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah Analisis Pengaruh Investasi dan Upah Minimum Kabupaten terhadap Kesempatan Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Bali.

Investasi sebagai salah satu faktor produksi merupakan faktor yang sangat penting dalam peningkatan kapasitas produksi ataupun jumlah industri. Peningkatan investasi ini sangat dipengaruhi oleh permintaan terhadap hasil produksi baik permintaan dari dalam negeri. Permintaan tersebut merupakan pasar dan hal ini berpengaruh pada jumlah tenaga kerja dalam kegiatan produksi (Dharma dan Djohan, 2015). Adanya investasi dalam masyarakat pertama-tama

akan memberikan dan menambah kesempatan kerja sehingga pendapatan masyarakat pun bertambah. Bertambahnya pendapatan akan memperbesar konsumsi masyarakat, sehingga para pengusaha akan terdorong untuk memperbesar produksinya dengan memperluas perusahaanya, baik dengan menambah materialnya, tenaga kerjanya dan faktor-faktor produksi lainnya.

Untuk mengetahui proses kesempatan kerja harus diketahui terlebih dahulu proyek investasi di waktu yang akan datang. Persoalan yang lebih lanjut adalah perlu diketahui seberapa jauh berubahnya kesempatan kerja akibat dari penambahan jumlah investasi. Penyerapan tenaga kerja erat hubungannya dengan kemampuan pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang nyaman dan kualitas sumber daya manusia dalam menciptakan lapangan kerja. Peningkatan investasi akan membuka atau memperluas kesempatan kerja. Sehingga akan menyerap sumber daya manusia yang lebih banyak. Dengan bertambahnya investasi maka tercipta kesempatan kerja baru yang pada akhirnya akan menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi angka pengangguran.

Salah satu cara memberikan penghargaan terhadap prestasi kerja karyawan yaitu dengan melalui upah. Upah merupakan masalah yang menarik dan penting bagi perusahaan, karena upah mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pekerja. Sebagai salah satu dari barometer di dalam pengukuran-pengukuran berbagai macam kesejahteraan, maka pemerintah berperan aktif untuk mengaturnya. Pemerintah telah mengatur Upah Minimal Kota/Kabupaten (UMK). Di berbagai propinsi ternyata penetapan upah minimum berbeda-beda, baik besarnya, persentase kenaikan setiap tahun, sistem penetapannya dan ruang



lingkup yang ditetapkan. Beberapa provinsi menetapkan upah minimum tunggal dan sebagian provinsi lainnya menetapkan upah minimum sektoral (Hutagalung dan Santosa, 2013).

Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per-01/Men/1999 adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Yang dimaksud dengan tunjangan tetap adalah suatu jumlah imbalan yang diterima pekerja secara tetap dan teratur pembayarannya, yang dikaitkan dengan kehadiran ataupun pencapaian prestasi tertentu. Tujuan dari penetapan upah minimum adalah untuk mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja. Beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan termasuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja tanpa menafikan produktifitas perusahaan dan kemajuannya, termasuk juga pertimbangan mengenai kondisi ekonomi secara umum. Tujuan dari ditetapkannya upah minimum adalah untuk memenuhi standar hidup minimum sehingga dapat membiayai kebutuhan hidup tenaga kerja yang berpendapatan rendah. Apabila tingkat upah naik sedangkan harga input lain tetap, berarti harga tenaga kerja relatif mahal dari input lain. Situasi ini mendorong pengusaha untuk mengurangi penggunaan tenaga kerja yang relatif mahal dengan input-input lain yang harga relatifnya lebih murah guna mempertahankan keuntungan yang maksimum.

Investasi memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan tingkat produktivitas (Aurangzeb dan Anwar, 2012). Belanja public untuk modal dan pendidikan adalah investasi yang mampu merangsang pertumbuhan (Butkiewicz dan Yanikkaya, 2011). Investasi

diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi (Aydi dan Aguir, 2017). Investasi dianggap sebagai bagian yang penting dalam dari variabel makro yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Yerimias, 2011). Investasi memiliki hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Thi Canh dan Anh Phong, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Anna Ek (2007) juga menunjukkan hasil pengaruh positif investasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut Phetsavong dan Ichihashi (2012) hasil empiris menunjukkan bahwa investasi memainkan peran penting dalam memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi.

Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan adanya peranan pemerintah daerah memanfaatkan semua sumberdaya secara optimal (Fajrii dkk, 2016). Tenaga kerja memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi (Seyfried, 2016). Selama tahap awal pemulihan ekonomi terbaru, ada banyak diskusi mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. Pengalihan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor modern (industri) selanjutnya akan meningkatkan pertumbuhan output dan peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor modern. Okun's Law menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan mengurangi tingkat pengangguran (Kusumawati, 2012). Menurut Kuncoro (2010), pertumbuhan ekonomi juga tergantung dari besaran nilai investasi yang mampu menggerakkan perekonomian.

#### **METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif berbentuk asosiatif. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun hubungan antara dua variabel atau

lebih yang artinya penelitian ini dilakukan untuk mengetahui analisis pengaruh investasi dan upah minimum kabupaten terhadap kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Bali.

Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah kabupaten/kota Provinsi Bali. Pemilihan lokasi penelitian ini di kabupaten/kota Provinsi Bali karena laju pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Bali tahun 2010-2017 mengalami peningkatan dan penurunan disetiap tahunnya pada masing-masing kabupaten/kota.

Objek dalam penelitian ini adalah investasi, upah minimum kabupaten, kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Bali. Data diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik.

Titik pengamatan dalam penelitian ini di 9 kabupaten/kota di Provinsi Bali dalam rentang waktu 2010 hingga 2017 dengan data 8 tahun maka besarnya titik pengamatan adalah 72 titik pengamatan dengan menggunakan data panel. Data panel merupakan gabungan dari *cross section* dan *time series*.

Teknik analisis data yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kuantitatif dengan bantuan program SPSS. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis jalur (*path analysis*).

Berdasarkan gambar diatas dapat dibuat persamaan struktural sebagai berikut:

$$Y_1 = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e_1 \dots \dots \dots (1)$$

$$Y_2 = \beta_3 X_1 + \beta_4 X_2 + \beta_5 Y_1 + e_2 \dots \dots \dots (2)$$

Keterangan:

$Y_2$  = Pertumbuhan ekonomi

$Y_1$  = Kesempatan kerja

$X_1$  = Investasi

$X_2$  = Upah minimum kabupaten

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$  = Koefisien regresi untuk masing-masing variabel X

$e_1, e_2$  = *error*

## HASIL DAN PENELITIAN

Untuk dapat menyusun persamaan struktural yang digunakan, maka terlebih dahulu data yang diperoleh diolah dan dihitung menggunakan program SPSS versi 24.0 sehingga diperoleh hasil analisis seperti pada Tabel 1 dan Tabel 2.

**Tabel 1.**  
**Hasil Analisis Jalur Regresi 1**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1,350	5,924		0,228	0,820
Investasi	0,076	0,290	0,031	0,263	0,793
UMK	0,607	0,288	0,249	2,106	0,039

a. Dependent Variable: Kesempatan Kerja

$R^2 = 0,060$

F = 2,219

F sig = 0,116

Sumber: Data diolah, 2019

Berdasarkan hasil Tabel 1 maka persamaan sub-struktural 1 adalah sebagai berikut:

$$Y_1 = 0,031X_1 + 0,249X_2$$

**Tabel 2.**  
**Hasil Analisis Jalur Regresi 2**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1,432	0,134		10,649	0,000
Investasi	0,024	0,007	0,402	3,573	0,001
UMK	0,006	0,007	0,107	0,921	0,360
Kesempatan Kerja	-0,001	0,003	-0,029	-0,250	0,803

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi  
 $R^2 = 0,160$   
 $F = 4,302$   
 $F \text{ sig} = 0,008$

Sumber: Data diolah, 2019

Berdasarkan hasil Tabel 2 maka persamaan sub-struktural 2 adalah sebagai berikut:

$$Y_2 = 0,402X_1 + 0,107X_2 + -0,029Y_1$$

Untuk mengetahui nilai  $e_1$  yang menunjukkan jumlah *variance* kesempatan kerja yang tidak dijelaskan oleh variabel-variabel investasi dan upah minimum kabupaten dapat dihitung dengan rumus.

$$\begin{aligned} e_1 &= \sqrt{1 - R_1^2} \\ &= \sqrt{1 - 0,060} \\ &= \sqrt{0,94} \\ &= 0,969 \end{aligned}$$

Untuk mengetahui nilai  $e_2$  yang menunjukkan *variance* pertumbuhan ekonomi yang tidak dijelaskan oleh variabel investasi, upah minimum kabupaten dan pertumbuhan ekonomi maka dihitung menggunakan rumus.

$$\begin{aligned} e_2 &= \sqrt{1 - R_2^2} \\ &= \sqrt{1 - 0,160} \\ &= \sqrt{0,84} \end{aligned}$$

$$= 0,916$$

Untuk memeriksa validitas model, terdapat indikator untuk melakukan pemeriksaan, yaitu koefisien determinasi total hasilnya sebagai berikut.

$$\begin{aligned} R^2_m &= 1 - (e_1)^2 (e_2)^2 \\ &= 1 - (0,969)^2 (0,916)^2 \\ &= 1 - (0,938) (0,839) \\ &= 1 - 0,786 \\ &= 0,214 \end{aligned}$$

Keterangan:

$R^2_m$  = Koefisien determinasi total

$e_1^2, e_2^2$  = Nilai kekeliruan taksiran standar

Koefisien determinasi total sebesar 0,214 mempunyai arti bahwa 21,4 persen variasi pertumbuhan ekonomi dipengaruhi model yang dibentuk oleh investasi, upah minimum dan kesempatan kerja sedangkan sisanya yaitu 78,6 persen dipengaruhi oleh variabel lain diluar model yang dibentuk.

**Tabel 3.**  
**Hasil Pengaruh Langsung, Pengaruh Tidak Langsung dan Pengaruh Total Antar Variabel**

Hubungan Variabel	Pengaruh		Total
	Langsung	Tidak Langsung	
$X_1 \rightarrow Y_1$	0,031	-	0,031
$X_1 \rightarrow Y_2$	0,402	-0,0009	0,4011
$X_2 \rightarrow Y_1$	0,249	-	0,249
$X_2 \rightarrow Y_2$	0,107	-0,0072	0,0998
$Y_1 \rightarrow Y_2$	-0,029	-	-0,029

Sumber: Data diolah, 2019

Keterangan :

$X_1$  = Investasi

$X_2$  = Upah Minimum Kabupaten

$Y_1$  = Kesempatan Kerja

$Y_2$  = Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan uraian di atas Tabel 3 dapat diketahui nilai pengaruh langsung investasi terhadap kesempatan kerja sebesar 0,031. Pengaruh langsung investasi terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,402. Pengaruh langsung upah minimum kabupaten terhadap kesempatan kerja sebesar 0,249. Pengaruh langsung upah minimum kabupaten terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,701. Pengaruh langsung kesempatan kerja terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar -0,029. Pengaruh tidak langsung investasi terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar -0,0009. Pengaruh tidak langsung upah minimum kabupaten terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar -0,0072.

Nilai signifikansi  $0,793 > 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, ini berarti investasi tidak berpengaruh terhadap kesempatan kerja di kabupaten/kota Provinsi Bali.

Nilai signifikansi  $0,039 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, ini berarti upah minimum kabupaten berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja di kabupaten/kota Provinsi Bali.

Nilai signifikansi  $0,001 < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Artinya investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Bali.

Nilai signifikansi  $0,360 > 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Artinya upah minimum kabupaten tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Bali.

Nilai signifikansi  $0,803 > 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Artinya kesempatan kerja tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Bali.

Jika  $z$  hitung  $\leq 1,96$  maka  $H_0$  diterima yang berarti kesempatan kerja bukan variabel intervening. Jika  $z$  hitung  $> 1,96$  maka  $H_0$  ditolak yang berarti kesempatan kerja merupakan variabel intervening.

Perhitungan

$$\begin{aligned}
 S_{b1b5} &= \sqrt{\beta_5^2 S_{\beta_1}^2 + \beta_1^2 S_{\beta_5}^2} \\
 &= \sqrt{(-0,001)^2 (0,290)^2 + (0,076)^2 (0,003)^2} \\
 &= \sqrt{(-0,000001)(0,0841) + (0,0057)(0,000009)} \\
 &= \sqrt{(-0,00000008) + (0,00000005)} \\
 &= \sqrt{-0,00000003} \\
 &= 0,0001 \\
 Z &= \frac{\beta_1 \beta_5}{S_{\beta_1 \beta_5}} \\
 &= \frac{(0,076)(-0,001)}{0,0001} \\
 &= \frac{-0,000076}{0,0001} = -0,076
 \end{aligned}$$

Keterangan:

- $\beta_1$  = Koefisien regresi pengaruh variabel  $X_1$  terhadap  $Y_1$
- $\beta_5$  = Koefisien regresi pengaruh variabel  $Y_1$  terhadap  $Y_2$
- $S_{\beta_1}$  = Standar error koefisien regresi variabel  $X_1$  terhadap  $Y_1$
- $S_{\beta_5}$  = Standar error koefisien regresi variabel  $Y_1$  terhadap  $Y_2$



Berdasarkan hasil z hitung yaitu sebesar  $-0,076 < 1,96$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Artinya investasi tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui kesempatan kerja.

Jika z hitung  $\leq 1,96$  maka  $H_0$  diterima yang berarti kesempatan kerja bukan variabel intervening. Jika z hitung  $> 1,96$  maka  $H_0$  ditolak yang berarti kesempatan kerja merupakan variabel intervening.

Perhitungan

$$\begin{aligned}
 S\beta_2\beta_5 &= \sqrt{\beta_5^2 S_{\beta_2}^2 + \beta_2^2 S_{\beta_5}^2} \\
 &= \sqrt{(-0,001)^2 (0,288)^2 + (0,607)^2 (0,003)^2} \\
 &= \sqrt{(-0,000001)(0,0829) + (0,368)(0,000009)} \\
 &= \sqrt{(-0,00000008) + (0,0000033)} \\
 &= \sqrt{0,00000322} \\
 &= 0,0017 \\
 Z &= \frac{\beta_2\beta_5}{S\beta_2\beta_5} \\
 &= \frac{(0,607)(-0,001)}{0,0017} \\
 &= \frac{-0,0006}{0,0017} = -0,352
 \end{aligned}$$

Keterangan;

- $\beta_2$  = Koefisien regresi pengaruh variabel  $X_2$  terhadap  $Y_1$
- $\beta_5$  = Koefisien regresi pengaruh variabel  $Y_1$  terhadap  $Y_2$
- $S\beta_2$  = Standar error koefisien regresi variabel  $X_2$  terhadap  $Y_1$
- $S\beta_5$  = Standar error koefisien regresi variabel  $Y_1$  terhadap  $Y_2$

Berdasarkan hasil  $z$  hitung yaitu sebesar  $-0,352 < 1,96$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Artinya upah minimum kabupaten tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui kesempatan kerja.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan diperoleh nilai *standardized coefficient beta* sebesar 0,031 dan nilai signifikansi sebesar  $0,0793 > 0,05$ . Hal ini berarti  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa investasi tidak berpengaruh terhadap kesempatan kerja di kabupaten/kota Provinsi Bali. Menurut Dharma dan Djohan (2015), investasi sebagai salah satu faktor produksi merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kapasitas produksi ataupun jumlah industri. Daya Tarik investasi asing dalam negara berkembang adalah dapat meningkatkan kesempatan kerja dan pembentukan modal (Siddiqui dan Ahmed, 2017). Dilihat dari data APBD Kabupaten/Kota Provinsi Bali pada tahun 2017, 8 dari 9 Kabupaten/Kota Provinsi Bali menunjukkan bahwa belanja pegawai memiliki persentase yang lebih kecil dibandingkan dengan belanja modal. Belanja pegawai di Kabupaten Jembrana sebesar 8,96 persen, sementara belanja modal sebesar 44,89 persen. Pada Kabupaten Tabanan belanja pegawai sebesar 2,97 persen, sementara belanja modal sebesar 38,96 persen. Pada Kabupaten Badung belanja pegawai sebesar 4,03 persen sementara belanja modal sebesar 46,74 persen. Pada Kabupaten Gianyar belanja pegawai sebesar 5,45 persen, sementara belanja modal sebesar 47,85 persen. Pada Kabupaten Klungkung belanja pegawai sebesar 3,81 persen, sementara belanja modal sebesar 37,52

persen. Pada Kabupaten Karangasem belanja pegawai sebesar 3,53 persen, sementara belanja modal sebesar 37,83 persen. Pada Kabupaten Buleleng belanja pegawai sebesar 4,45 persen, sementara belanja modal sebesar 30,85 persen. Pada Kota Denpasar belanja pegawai sebesar 2,62 persen, sementara belanja modal sebesar 27,17 persen, namun pada Kabupaten Bangli data menunjukkan bahwa belanja pegawai lebih besar yaitu sebesar 61,50 persen sementara belanja modal sebesar 19,34 persen. Belanja modal yang dilakukan pemerintah Kabupaten/Kota provinsi Bali melalui APBD merupakan faktor yang menyebabkan investasi tidak berpengaruh terhadap kesempatan kerja. Tidak berpengaruhnya investasi terhadap kesempatan kerja yang diakibatkan oleh belanja modal yang dilakukan pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Bali diakibatkan karena investasi modal yang dilakukan perusahaan menyebabkan perusahaan semakin efisien dalam segi produksi maupun operasionalnya. Perusahaan tidak perlu lagi untuk menyerap tenaga kerja dalam skala besar, karena dalam proses produksi maupun operasionalnya sudah dikerjakan oleh mesin atau teknologi. Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan Dharma dan Djohan (2015) yang berjudul “Pengaruh Investasi dan Inflasi terhadap Kesempatan Kerja melalui Pertumbuhan Ekonomi di Kota Samarinda”, dimana diperoleh hasil bahwa Investasi tidak memberikan pengaruh terhadap kesempatan kerja di Kota Samarinda.

Berdasarkan analisis diperoleh nilai *standardized coefficient beta* sebesar 0,249 dan nilai signifikansi  $0,039 < 0,05$ . Hal ini berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, ini berarti upah minimum kabupaten berpengaruh positif dan signifikan

terhadap kesempatan kerja di kabupaten/kota Provinsi Bali. Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per-01/Men/1999 adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Tujuan dari penetapan minimum adalah untuk mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja. Beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan termasuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja tanpa mengabaikan produktifitas perusahaan dan kemajuannya, termasuk juga pertimbangan mengenai kondisi ekonomi secara umum. Penetapan upah minimum kabupaten adalah untuk memenuhi standar hidup tenaga kerja sehingga kesejahteraan tenaga kerja akan meningkat dan berpengaruh terhadap produktifitas tenaga kerja. Perusahaan akan membuka kesempatan kerja dengan upah minimum yang telah ditetapkan dengan harapan standar upah minimum tersebut dapat meningkatkan produktifitas tenaga kerja yang nantinya akan bekerja diperusahaan tersebut.

Berdasarkan analisis diperoleh nilai *standardized coefficient beta* sebesar 0,402 dan nilai signifikansi sebesar  $0,001 < 0,05$ . Hal ini berarti  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, artinya investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Bali. Menurut Aurangzeb dan Anwar (2012), investasi memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan tingkat produktivitas. Investasi asing memacu pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang (Gungor dan Hamza, 2017). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Anna Ek (2007), yang menunjukkan bahwa investasi berpengaruh positif dan signifikan

terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut Butkiewicz dan Yanikkaya (2011), belanja publik untuk modal dan pendidikan adalah investasi yang mampu merangsang pertumbuhan (Butkiewicz dan Yanikkaya, 2011). Investasi merupakan faktor penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu negara (Turan Subasat, 2011).

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka diperoleh hasil yang menyatakan nilai *standardized coefficient beta* sebesar 0,107 dan nilai signifikansi  $0,360 > 0,05$ . Hal ini berarti  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Dengan demikian upah minimum kabupaten tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Bali. Tidak berpengaruhnya upah minimum kabupaten terhadap pertumbuhan ekonomi disebabkan, dengan meningkatnya upah minimum maka perusahaan harus membayar tenaga kerja lebih tinggi dari sebelumnya, hal tersebut meningkatkan beban biaya perusahaan. Biaya yang tinggi mengakibatkan banyak perusahaan tidak mampu untuk mempekerjakan karyawan lebih banyak lagi. Hal tersebut mengakibatkan tidak terserapnya lapangan kerja penuh (*full employment*). Dengan tidak terserapnya tenaga kerja secara maksimal, maka tingkat konsumsi masyarakat yang tidak bekerja akan menurun, dan berpengaruh terhadap produksi barang dan jasa yang dimana produksi barang dan jasa merupakan cerminan dari pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut yang mengakibatkan upah minimum kabupaten tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut Rimbawan (2010), pertumbuhan ekonomi yang tinggi identik dengan pendapatan perkapita yang tinggi pula. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat

menghasilkan kenaikan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka diperoleh hasil yang menyatakan *standardized coefficient beta* -0,028 dan nilai signifikansi 0,749 > 0,05. Hal ini berarti  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Dengan demikian kesempatan kerja tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Bali. Penelitian ini tidak sejalan dengan teori pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh Solow tentang fungsi produksi agregat (Dornbusch, Fischer, dan Startz, 2004) menyatakan bahwa bahwa output nasional (sebagai representasi dari pertumbuhan ekonomi disimbolkan dengan  $Y$ ) merupakan fungsi dari modal (kapital= $K$ ) fisik, tenaga kerja ( $L$ ), dan kemajuan teknologi yang dicapai ( $A$ ). Belanja pegawai memiliki persentasi lebih kecil dibandingkan belanja modal, dengan rata-rata persentase belanja pegawai sebesar 10,81 persen, dan belanja modal sebesar 36,80 persen menyebabkan kesempatan kerja tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Kesempatan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali dikarenakan belanja modal relatif besar. Belanja barang dan jasa ditambah belanja modal sebesar 89,19 persen jumlah yang besar tersebut tidak digunakan untuk kesempatan kerja sehingga kesempatan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali.

Hasil perhitungan didapatkan perbandingan  $z$  hitung sebesar -0,076. Berdasarkan hasil  $z$  hitung yaitu sebesar  $-0,076 < 1,96$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Artinya investasi tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap

pertumbuhan ekonomi melalui kesempatan kerja. Investasi tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui kesempatan kerja disebabkan oleh tingkat belanja modal lebih tinggi yaitu sebesar 36,80 persen dibandingkan belanja pegawai yang sebesar 10,80 persen (BPS Provinsi Bali, 2018). Hal tersebut menggambarkan bahwa pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Bali lebih banyak mengalokasikan dananya untuk investasi dalam bentuk teknologi maupun mesin. Hal tersebut berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja, dapat dilihat dari persentase belanja pegawai sebesar 10,80 persen (BPS Provinsi Bali, 2018). Tidak terserapnya tenaga kerja akan berpengaruh terhadap tingkat konsumsi masyarakat yang tidak bekerja, sehingga berpengaruh terhadap produksi barang dan jasa, yang dimana produksi barang dan jasa merupakan cerminan dari pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut yang mengakibatkan investasi tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui kesempatan kerja.

Hasil perhitungan didapatkan perbandingan  $z$  hitung sebesar  $-0,352$ . Berdasarkan hasil  $z$  hitung yaitu sebesar  $-0,352 < 1,96$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Artinya upah minimum kabupaten tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui kesempatan kerja. Tidak berpengaruhnya upah minimum kabupaten secara tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui kesempatan kerja disebabkan, dengan meningkatnya upah minimum maka perusahaan harus membayar tenaga kerja lebih tinggi dari sebelumnya, hal tersebut meningkatkan beban biaya perusahaan. Biaya yang tinggi mengakibatkan banyak perusahaan tidak mampu untuk

mempekerjakan karyawan lebih banyak lagi. Hal tersebut mengakibatkan tidak terciptanya lapangan kerja yang lebih tinggi. Dengan tidak terserapnya tenaga kerja, maka tingkat konsumsi masyarakat yang tidak bekerja akan menurun, dan berpengaruh terhadap produksi barang dan jasa yang dimana produksi barang dan jasa merupakan cerminan dari pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut yang mengakibatkan upah minimum kabupaten tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui kesempatan kerja

Investasi sebagai salah satu faktor produksi merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kapasitas produksi ataupun jumlah industri. Permintaan tersebut merupakan pasar dan hal ini berpengaruh pada jumlah tenaga kerja dalam kegiatan produksi. Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per-01/Men/1999 adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Tujuan dari penetapan minimum adalah untuk mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja. Beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan termasuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja tanpa menafikan produktifitas perusahaan dan kemajuannya, termasuk juga pertimbangan mengenai kondisi ekonomi secara umum. Menurut Aurangzeb dan Anwar (2012), Investasi memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan tingkat produktivitas. Belanja publik untuk modal dan pendidikan adalah investasi yang mampu merangsang pertumbuhan (Butkiewicz dan Yanikkaya, 2011).

Tidak berpengaruhnya upah minimum kabupaten terhadap pertumbuhan ekonomi disebabkan, dengan meningkatnya upah minimum maka perusahaan



harus membayar tenaga kerja lebih tinggi dari sebelumnya, hal tersebut meningkatkan beban biaya perusahaan. Biaya yang tinggi mengakibatkan banyak perusahaan tidak mampu untuk mempekerjakan karyawan lebih banyak lagi. Hal tersebut mengakibatkan tidak terserapnya lapangan kerja penuh (*full employment*). Hal tersebut yang mengakibatkan upah minimum kabupaten tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja pegawai yang memiliki persentasi lebih kecil dibandingkan belanja barang dan jasa, dan belanja modal, dengan rata-rata persentase belanja pegawai sebesar 10,81 persen, belanja barang dan jasa sebesar 52,39 persen, dan belanja modal sebesar 36,80 persen menyebabkan kesempatan kerja tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Kesempatan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali dikarenakan belanja modal relatif besar. Belanja barang dan jasa ditambah belanja modal sebesar 89,19 persen jumlah yang besar tersebut tidak digunakan untuk kesempatan kerja sehingga kesempatan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali.

Investasi tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui kesempatan kerja disebabkan oleh tingkat belanja modal lebih tinggi yaitu sebesar 36,80 persen dibandingkan belanja pegawai yang sebesar 10,80 persen (BPS Provinsi Bali, 2018). Tidak terserapnya tenaga kerja akan berpengaruh terhadap tingkat konsumsi masyarakat yang tidak bekerja, sehingga berpengaruh terhadap produksi barang dan jasa, yang dimana produksi barang dan jasa merupakan cerminan dari pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut yang mengakibatkan investasi tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap

pertumbuhan ekonomi melalui kesempatan kerja. Tidak berpengaruhnya upah minimum kabupaten secara tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui kesempatan kerja disebabkan, dengan meningkatnya upah minimum maka perusahaan harus membayar tenaga kerja lebih tinggi dari sebelumnya, hal tersebut meningkatkan beban biaya perusahaan. Biaya yang tinggi mengakibatkan banyak perusahaan tidak mampu untuk mempekerjakan karyawan lebih banyak lagi. Hal tersebut mengakibatkan tidak terciptanya lapangan kerja yang lebih tinggi. Hal tersebut yang mengakibatkan upah minimum kabupaten tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui kesempatan kerja.

#### **SIMPULAN**

Investasi secara langsung tidak berpengaruh terhadap kesempatan kerja di kabupaten/kota Provinsi Bali, sedangkan upah minimum kabupaten secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja di kabupaten/kota Provinsi Bali.

Investasi secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Bali, sedangkan upah minimum kabupaten dan kesempatan kerja secara langsung tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Bali.

Investasi dan upah minimum kabupaten tidak memiliki pengaruh tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui kesempatan kerja di kabupaten/kota Provinsi Bali.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kesempatan kerja, karena investasi yang ditanamkan berorientasi pada bentuk investasi padat modal. Sektor-sektor yang dominan seperti sektor industri di harapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi, agar tenaga kerja dapat terserap banyak. Investasi yang ada di kabupaten/kota Provinsi Bali masih terfokus di beberapa sektor saja sehingga tidak merata disegala sektor sehingga kontribusinya juga masih kecil terhadap pertumbuhan ekonomi, investasi yang tidak merata berdampak terhadap kurangnya tenaga kerja yang terserap sehingga kesempatan kerja juga masih rendah.

Hasil penelitian ini diharapkan kepada pemerintah maupun *stakeholder* terkait di kabupaten/kota Provinsi Bali diharapkan untuk terus memperhatikan kesejahteraan tenaga kerja dengan penetapan upah minimum kabupaten setiap tahunnya mengikuti tingkat inflasi yang terjadi tanpa menafikan produktifitas perusahaan dan kemajuannya, tingkat upah minimum yang baik mampu meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja sehingga produksi dan permintaan akan meningkat yang dimana akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Pemerintah maupun *stakeholder* yang terkait juga diharapkan untuk membuka kesempatan kerja seluas-luasnya dengan meningkatkan investasi sehingga tenaga kerja mampu terserap secara optimal ke lapangan kerja. Maka kesempatan kerja mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Bali.

Tingkat upah minimum kabupaten/kota di Provinsi Bali diharapkan dapat terus meningkat karena dengan peningkatan upah menyebabkan peningkatan

konsumsi masyarakat sehingga terjadi peningkatan produksi perusahaan dan tenaga kerja terserap. Dalam investasi, pemerintah diharapkan dapat mengoptimalkan investasi di daerah yang potensinya belum tergali agar investasi dapat merata di seluruh kabupaten/kota Provinsi Bali. Pihak swasta juga diharapkan dapat lebih mengupayakan tenaga kerja yang padat karya dibandingkan dengan tenaga kerja yang padat modal.

## REFERENSI

- Arsyad, Licolin. (2010). *Ekonomi Pembangunan. Edisi Kelima*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Aydi, Mohamed and Abdelkader, Aguir. (2017). Financial Development and Economic Growth: The Empirical Evidence of the Southern Mediterranean Countries. *International Journal of Economics and Financial Issues*. Vol. 7. No. 3.
- Aurangzeb and UI Haq, Anwar. (2012). Impact of Investment Activities on Economic Growth of Pakistan. *Business and Management Review*. Vol. 2, No. 1.
- Badan Pusat Statistik. (2009). *Provinsi Bali Dalam Angka*. Denpasar: BPS Bali.
- \_\_\_\_\_. (2014). *Provinsi Bali Dalam Angka*. Denpasar: BPS Bali.
- \_\_\_\_\_. (2018). *Provinsi Bali Dalam Angka*. Denpasar: BPS Bali.
- Butkiewicz, I. A and Yanikkaya, H. (2011). Institutions and The Impact of Government Spending on Growth. *Journal of Applied Economics*. Vol. 14, No. 2, hal. 319-341.
- Cahya Ningsih, Ni Made dan Bagus Indrajaya, I Gusti. (2015). Pengaruh Modal Dan Tingkat Upah Terhadap Nilai Produksi Serta Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Kerajinan Perak. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Vol. 8, No. 1, Hal. 83-91.
- Canh, Nguyen Thi., and Phong, Nguyen Anh. (2018). Effect of Public Investment on Private Investment and Economic Growth: Evidence From Vietnam by Economic Industries. *Applied Economics and Finance*. Vol. 5, No. 2.

- Dayuh Rimbawan, Nyoman. (2012). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesempatan Kerja (Kasus Provinsi Bali, 2001-2011). *PIRAMIDA*. Vol. 8, No. 2, Hal. 76-84
- Dornbusch, Rudiger., Stanley Fisher, and Richard Startz. (2004). *Makroekonomi, Edisi Bahasa Indonesia*. Terjemahan Yusuf dan Roy Indra Mirazudin. Jakarta: PT. Media Global Edukasi.
- Ek, Anna. (2007). The Impact of FDI on Economic Growth The Case of China. *Jönköping International Business School*.
- Fajrii, Muhammad., Delis, Arman., dan Amzar, Yohanes Vyn. (2016). Dampak Otonomi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Keterbukaan Daerah terhadap Ketimpangan Wilayah di Sumatera. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Vol. 9, No. 2, hal. 99-107.
- Gungor, Hasan., and Ringim, Salim Hamza. (2017). Linkage between Foreign Direct Investment, Domestic Investment and Economic Growth: Evidence from Nigeria. *International Journal of Economics and Financial Issues*. Vol. 7, No. 3.
- Hayati, Mardinah. (2016). Investasi menurut persepsi ekonomi islam. *Jurnal ekonomi dan bisnis islam*. Vol 1 No 1. Hal 66-78.
- Hutagalung, Paul SP dan Budi Santoso, Purbayu. (2013). Analisis Pengaruh Upah Minimum Dan Inflasi Terhadap Kesempatan Kerja Sektor Industri Pengolahan Besar Dan Sedang Di Jawa Tengah. *Diponegoro Journal Of Economics*. Vol. 2, No. 4.
- Jhingan, M.L. (2007). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, Edisi 1*. Cetakan Ketujuh. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kuncoro, Mudrajad. (2010). *Dasar-dasar Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Kunle M, Adeleke., Olowe, S.O., and Oluwafolakemi, Fasesin Oladipo. (2014). Impact of Foreign Direct Investment on Nigeria Economic Growth. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*. Vol. 4, No. 8.
- Lindblad, J.Thomas., and Wie, Thee Kian. (2007). Survey of Recent Developments. *Bulletin of Indonesia Economic Studies*. Vol. 43, No. 1. Hal. 7-33.
- Mawar, Murni Yunus., Mahyideen, Jamilah Mohd., and Saidon, Ruhaida. (2015). Economic Growth And Income Inequality. *Proceeding of the 2nd International Conference on Management and Muamalah*.

- Parinduri, Rasyad A. 2016. Family Hardship and The Growth Of Micro And Small Firms In Indonesia. *Bulletin oh Indonesian Economic Studies*.50(1), pp:]53-73.
- Phetsavong, Kongphet., and Ichihashi, Masaru. (2012). The Impact of Public and Private Investment on Economic Growth: Evidence from Developing Asian Countries. *IDEA Discussion paper, Hiroshima University*.
- Sarungu, J.J., dan Endah K, Maharsi. (2013). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Investasi di Indonesia tahun 1990-2010: Metode ECM. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Vol. 6, No. 2, Hal. 112-117.
- Seran, Sirilius. 2017. Hubungan Antara Pendidikan, Pengangguran, dan Pertumbuhan Ekonomi Dengan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Vol. 10, No. 1, hal: 59-71.
- Seyfried, William. (2016). Examining the Relationship Between Employment and Economic Growth in the Ten Largest States. *Southwestern Economic Review*.
- Siddiqui, Areej Aftab., and Ahmed, Shahid. (2017). Impact of Foreign Direct Investment on Sectoral Growth of Indian Economy. *International Journal of Economics and Financial Issues*. Vol. 7, No. 3.
- Siregar, Hermanto., dan Dwi, Wahyuniarti. (2008). Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin.
- Sjafii, Achmad. (2009). Pengaruh Investasi Fisik dan Sumber Daya Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Journal Of Indonesian Applied Economics*. Vol.7, No 1.
- Sukirno, Sadono. (2000). *Makro Ekonomi Modern*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suryahadi, Asep., Hadiwidjaja, Gracia., dan Sumarto, Sudarno. (2012). Economic Growth And Poverty Reduction In Indonesia Before an After The Asian Financial Crisis. *Bulletin of Indonesia Economic Studies*. Vol. 48, No. 2, Hal. 209-227.
- Taiwo, Muritaladan Taiwo Abayomi. 2011. *Government Expenditure and Economic Development*. *European Journal of Business and Management*, 3(9).

- Tapparan, Samuel Randy. (2017). Pengaruh Upah Minimum dan Investasi terhadap Kesempatan Kerja di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Pemikiran Ilmiah dan Pendidikan Administrasi Perkantoran*. Vol. 4, No. 1,
- Taufik, Muhammad. (2014). Pengaruh Investasi Dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*. Vol. 7, No. 2, Hal. 90-110.
- Turan Subasat and Sotiris Bellos,(2011)"Economic Freedom and Foreign Direct Investmentin Latin America :A Panel Gravity Model Approach", *Economics Bulletin*, Vol.31no.3pp.2053-2065.